

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS  
PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DI KOTA  
PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**EGA IHWANUL HAKIM**

**2110115001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS PERUNDUNGAN  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DI KOTA PADANG**

(Ega Ihwanul Hakim, 2110115001, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2024, 66 halaman)

**ABSTRAK**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dijaga agar tumbuh dengan baik, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan hukum. Negara, keluarga, dan masyarakat harus memastikan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak terpenuhi. Perlindungan anak, terutama terhadap kekerasan pada perundungan, sangat penting karena dapat merusak fisik dan psikologis korban serta menghambat perkembangan sosial anak. Di Indonesia, kasus perundungan terus meningkat, menandakan perlindungan anak belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif dan pemberdayaan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, bagaimana bentuk tanggung jawab negara memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus perundungan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus perundungan di lingkungan sekolah dasar di kota padang? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah *Pertama*, tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak perundungan di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan, dengan tingkat kejadian yang terus meningkat. Ketidakmampuan regulasi yang ada dalam menangani kasus perundungan ini menunjukkan perlunya adanya norma hukum yang lebih spesifik dan sanksi yang tegas guna melindungi hak asasi anak. Penegakan hukum yang lebih kuat dan koordinasi antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, dan beradab. *Kedua*, bahwa implementasi kebijakan terkait perlindungan anak, khususnya pencegahan perundungan, masih kurang efektif. Faktor penyebab perundungan mencakup kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan sosial, serta kegagalan sistem pendidikan dalam memberikan pencegahan yang tepat.

**RESPONSIBILITY OF THE STATE IN PROVIDING  
PROTECTION OF CHILDREN IN CASES OF BULLYING  
IN THE ELEMENTARY SCHOOL ENVIRONMENT IN PADANG CITY**

(Ega Ihwanul Hakim, 2110115001, Constitutional Law, Faculty of Law, Andalas  
University, 2024, 66 pages)

**ABSTRACT**

Children are God's trust and gifts that have rights that must be respected and protected. As the next generation of the nation, children must be taken care of so that they grow up well, free from violence and discrimination, and get legal protection. States, families, and communities must ensure that the rights of children stipulated in the 1945 Constitution and the United Nations Convention on the Rights of the Child are fulfilled. Child protection, especially against violence in bullying, is very important because it can damage the physical and psychological of the victim and hinder the social development of the child. In Indonesia, cases of bullying continue to increase, indicating that child protection is not yet effective. Therefore, preventive and empowerment measures are needed so that children can grow up in a safe, healthy, and violence-free environment. The government, the community, and families have a responsibility to create conditions that support children's development. Based on this background, the problems that are studied are: First, what is the form of state responsibility to provide protection for children in cases of bullying according to laws and regulations in Indonesia? Second, how effective are the regulations on bullying that have been in force so far in Indonesia? To answer the above problems, the author conducted a research using a research method using sociological juridical research methods. The results of this study are: First, the responsibility of the state in providing protection for child abuse in Indonesia is still a significant problem, with an increasing incidence rate. The inability of existing regulations to handle this bullying case shows the need for more specific legal norms and strict sanctions to protect children's human rights. Stronger law enforcement and coordination between communities, educational institutions, and the government are important steps in realizing effective legal protection for children, so that they can grow up in a safe, fair, and civilized environment. Second, that the implementation of policies related to child protection, especially the prevention of bullying, is still ineffective. Factors that cause bullying include lack of parental attention, the influence of the social environment, and the failure of the education system to provide proper prevention.